



BUPATI BOMBANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012, Bupati Bombana telah menetapkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ruang lingkup dan mekanisme pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438) ;
 10. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 255) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4503) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
23. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 / PMK.05 / 2007 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
 30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana 20 Tahun 2005 tentang tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bombana;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2012;
 34. Peraturan Bupati Bombana Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2012.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 32 dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2012

1. HONORARIUM TERTINGGI PENGELOLA KEUANGAN SKPD

1.1. Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Atasan Langsung Bendahara

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2012 (Rp.)
1.	Nilai Pagu Dana s/d 500 juta	OB	600.000
2.	Nilai Pagu Dana diatas 500 juta s/d 1 Milyar	OB	700.000
3.	Nilai Pagu Dana diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OB	800.000
4.	Nilai Pagu Dana diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OB	900.000
5.	Nilai Pagu Dana diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	1.000.000
6.	Nilai Pagu Dana diatas 10 Milyar s/d 25 milyar	OB	1.100.000
7.	Nilai Pagu Dana diatas 25 Milyar s/d 50 Milyar	OB	1.200.000
8.	Nilai Pagu Dana diatas 50 Milyar s/d 75	OB	1.300.000

	Milyar		
9.	Nilai Pagu Dana diatas 75 Milyar s/d 100 milyar	OB	1.400.000

1.2. Koordinator PPTK

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2012 (Rp.)
1.	Koordinator PPTK	OB	900.000

1.3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2012 (Rp.)
1.	Nilai Pagu Dana s/d 500 juta	OB	500.000
2.	Nilai Pagu Dana diatas 500 juta s/d 1 Milyar	OB	600.000
3.	Nilai Pagu Dana diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OB	700.000
4.	Nilai Pagu Dana diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OB	800.000
5.	Nilai Pagu Dana diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	900.000
6.	Nilai Pagu Dana diatas 10 Milyar s/d 25 milyar	OB	1.000.000
7.	Nilai Pagu Dana diatas 25 Milyar s/d 50 Milyar	OB	1.100.000
8.	Nilai Pagu Dana diatas 50 Milyar s/d 75 Milyar	OB	1.200.000
9.	Nilai Pagu Dana diatas 75 Milyar s/d 100 milyar	OB	1.300.000

1.3 Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2012 (Rp.)
1.	Nilai Pagu Dana s/d 500 juta	OB	400.000
2.	Nilai Pagu Dana diatas 500 juta s/d 1 Milyar	OB	500.000
3.	Nilai Pagu Dana diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OB	600.000
4.	Nilai Pagu Dana diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OB	700.000
5.	Nilai Pagu Dana diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	800.000
6.	Nilai Pagu Dana diatas 10 Milyar s/d 25 milyar	OB	900.000
7.	Nilai Pagu Dana diatas 25 Milyar s/d 50 Milyar	OB	1.000.000
8.	Nilai Pagu Dana diatas 50 Milyar s/d 75 Milyar	OB	1.100.000
9.	Nilai Pagu Dana diatas 75 Milyar s/d 100 milyar	OB	1.200.000

1.4 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2012 (Rp.)
1.	Nilai Pagu Dana s/d 500 juta	OB	350.000
2.	Nilai Pagu Dana diatas 500 juta s/d 1 Milyar	OB	450.000
3.	Nilai Pagu Dana diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OB	550.000
4.	Nilai Pagu Dana diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OB	650.000
5.	Nilai Pagu Dana diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	750.000
6.	Nilai Pagu Dana diatas 10 Milyar s/d 25 milyar	OB	850.000
7.	Nilai Pagu Dana diatas 25 Milyar s/d 50 Milyar	OB	950.000
8.	Nilai Pagu Dana diatas 50 Milyar s/d 75 Milyar	OB	1.050.000
9.	Nilai Pagu Dana diatas 75 Milyar s/d 100 milyar	OB	1.150.000

1.5 Bendahara Pengeluaran

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2012 (Rp.)
1.	Nilai Pagu Dana s/d 500 juta	OB	300.000
2.	Nilai Pagu Dana diatas 500 juta s/d 1 Milyar	OB	400.000
3.	Nilai Pagu Dana diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OB	500.000
4.	Nilai Pagu Dana diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OB	600.000
5.	Nilai Pagu Dana diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	700.000
6.	Nilai Pagu Dana diatas 10 Milyar s/d 25 milyar	OB	800.000
7.	Nilai Pagu Dana diatas 25 Milyar s/d 50 Milyar	OB	900.000
8.	Nilai Pagu Dana diatas 50 Milyar s/d 75 Milyar	OB	1.000.000
9.	Nilai Pagu Dana diatas 75 Milyar s/d 100 milyar	OB	1.100.000

1.6 Bendahara Penerimaan

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2012 (Rp.)
1.	Nilai Pagu Dana s/d 500 juta	OB	200.000
2.	Nilai Pagu Dana diatas 500 juta s/d 1 Milyar	OB	300.000
3.	Nilai Pagu Dana diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OB	400.000
4.	Nilai Pagu Dana diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OB	500.000
5.	Nilai Pagu Dana diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	600.000
6.	Nilai Pagu Dana diatas 10 Milyar s/d 25 milyar	OB	700.000
7.	Nilai Pagu Dana diatas 25 Milyar s/d 50 Milyar	OB	800.000
8.	Nilai Pagu Dana diatas 50 Milyar s/d 75 Milyar	OB	900.000
9.	Nilai Pagu Dana diatas 75 Milyar s/d 100 milyar	OB	1.000.000

1.7 Bendahara Pengeluaran Pembantu

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2012 (Rp.)
1.	Nilai Pagu Dana s/d 500 juta	OB	225.000
2.	Nilai Pagu Dana diatas 500 juta s/d 1 Milyar	OB	325.000
3.	Nilai Pagu Dana diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OB	425.000
4.	Nilai Pagu Dana diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OB	525.000
5.	Nilai Pagu Dana diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	625.000
6.	Nilai Pagu Dana diatas 10 Milyar s/d 25 milyar	OB	725.000
7.	Nilai Pagu Dana diatas 25 Milyar s/d 50 Milyar	OB	825.000
8.	Nilai Pagu Dana diatas 50 Milyar s/d 75 Milyar	OB	925.000
9.	Nilai Pagu Dana diatas 75 Milyar s/d 100 milyar	OB	1.025.000

1.8 Bendahara Penerimaan Pembantu

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2012 (Rp.)
1.	Nilai Pagu Dana s/d 500 juta	OB	125.000
2.	Nilai Pagu Dana diatas 500 juta s/d 1 Milyar	OB	225.000
3.	Nilai Pagu Dana diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OB	325.000
4.	Nilai Pagu Dana diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OB	425.000
5.	Nilai Pagu Dana diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	525.000
6.	Nilai Pagu Dana diatas 10 Milyar s/d 25 milyar	OB	625.000
7.	Nilai Pagu Dana diatas 25 Milyar s/d 50 Milyar	OB	725.000
8.	Nilai Pagu Dana diatas 50 Milyar s/d 75 Milyar	OB	825.000
9.	Nilai Pagu Dana diatas 75 Milyar s/d 100 milyar	OB	925.000

1.9 Pembantu Bendahara / Staf Administrasi Bendahara

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2012 (Rp.)
1.	Nilai Pagu Dana s/d 500 juta	OB	200.000
2.	Nilai Pagu Dana diatas 500 juta s/d 1 Milyar	OB	250.000
3.	Nilai Pagu Dana diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OB	350.000
4.	Nilai Pagu Dana diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OB	400.000
5.	Nilai Pagu Dana diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	450.000
6.	Nilai Pagu Dana diatas 10 Milyar s/d 25 milyar	OB	
7.	Nilai Pagu Dana diatas 25 Milyar s/d 50 Milyar	OB	
8.	Nilai Pagu Dana diatas 50 Milyar s/d 75 Milyar	OB	
9.	Nilai Pagu Dana diatas 75 Milyar s/d 100 milyar	OB	

1.10 Pengurus Barang / Bendahara Barang

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2012 (Rp.)
1.	Nilai Pagu Dana s/d 500 juta	OB	200.000
2.	Nilai Pagu Dana diatas 500 juta s/d 1 Milyar	OB	300.000
3.	Nilai Pagu Dana diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OB	400.000
4.	Nilai Pagu Dana diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OB	500.000
5.	Nilai Pagu Dana diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	600.000
6.	Nilai Pagu Dana diatas 10 Milyar s/d 25 milyar	OB	700.000
7.	Nilai Pagu Dana diatas 25 Milyar s/d 50 Milyar	OB	800.000
8.	Nilai Pagu Dana diatas 50 Milyar s/d 75 Milyar	OB	900.000
9.	Nilai Pagu Dana diatas 75 Milyar s/d 100 milyar	OB	1.000.000

2. HONORARIUM TERTINGGI PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		
	a. Koordinator	OB	2.200.000
	b. Anggota	OB	1.900.000
2.	Honor Kuasa BUD	OB	1,000,000
3.	Honor Pembantu Kuasa BUD	OB	600,000
4.	Honor Pembuat SP2D	OB	600,000
5.	Honor Bendahara Pembantu Pengelolaan Pajak	OB	600,000
6.	Honor Pembuat SPD	OB	600,000

3. HONORARIUM PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG / JASA

3.1 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2012 (Rp).
1	Nilai Pagu Dana s/d Rp.100 Juta	OB	300.000
2	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	400.000
3	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	450.000
4	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	500.000
5	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	700.000

6	Nilai Pagu Dana diatas Rp.2,5 Milyar s/d Rp.5 Milyar	OB	900.000
7	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	1.100.000
8	Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 Milyar s/d Rp.25 Milyar	OB	1.300.000
9	Nilai Pagu Dana diatas Rp.25 Milyar s/d Rp.50 Milyar	OB	1.500.000
10	Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 Milyar s/d Rp.75 Milyar	OB	1.700.000
11	Nilai Pagu Dana diatas Rp.75 Milyar s/d Rp.100 Milyar	OB	1.900.000
12	Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 Milyar	OB	2.100.000

3.2 Pejabat Pengadaan Barang / jasa

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa OB Rp. 365.000

3.3 Panitia Pengadaan Barang / Jasa

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2012 (Rp).
1	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Jt	OB	550.000
2	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Jt	OB	600.000
3	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 M	OB	700.000
4	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 M	OB	750.000
5	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.2,5 Milyar s/d Rp. 5 M	OB	950.000
6	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 M	OB	1.100.000
7	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.10 Milyar s/d Rp.25 M	OB	1.250.000
8	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.25 Milyar s/d Rp.50 M	OB	1.450.000
9	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.50 Milyar s/d Rp.75 M	OB	1.650.000
10	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.75 Milyar s/d Rp.100 M	OB	1.850.000

3.4 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2012 (Rp).
1	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan s/d Rp.100 Juta	Per Paket	250.000
2	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250Jt	OP	300.000
3	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Jt	OP	450.000
4	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 M	OP	500.000
5	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 M	OP	600.000
6	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas	OP	700.000

	Rp.2,5 Milyar s/d Rp. 5 M		
7	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 M	OP	800.000
8	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp.10 Milyar s/d Rp.25 M	OP	1.000.000
9	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp.25 Milyar s/d Rp.50 M	OP	1.100.000
10	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp.50 Milyar s/d Rp.75 M	OP	1.200.000

3.7 Pejabat Penerima Pekerjaan

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan OB Rp. 260.000

4. HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / PELATIHAN / WORKSHOP

4.1 Narasumber / Pembahas

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	NARASUMBER/PEMBAHAS		
	a. Bupati/ Wakil Bupati/Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan	OJ	1.500.000
	b. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1.300.000
	c. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	900.000

4.2 Moderator

Moderator OJ Rp. 600.000

5. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

5.1 Yang ditetapkan oleh Bupati/ Wakil Bupati

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2012 (Rp).
1	Pengarah	OB	1.500.000
2	Penanggungjawab	OB	1.250.000
3	Ketua	OB	1.000.000
4	Wakil Ketua	OB	850.000
5	Sekretaris	OB	750.000
6	Anggota	OB	750.000

5.2 Yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2012 (Rp).
1	Pengarah	OB	500.000
2	Penanggungjawab	OB	450.000
3	Ketua	OB	400.000
4	Wakil Ketua	OB	350.000
5	Sekretaris	OB	300.000
6	Anggota	OB	300.000

6. HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2012 (Rp).
1	Koordinator	OB	400.000
2	Anggota	OB	350.000

7. HONORARIUM TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI**7.1. Tim Koordinasi**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2012 (Rp).
1	Ketua	OB	1.300.000
2	Sekretaris	OB	1.100.000
3	Pendamping	OB	1.100.000
4	Anggota	OB	900.000

7.2. Sekretariat Tim Koordinasi

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2012 (Rp).
1	Koordinator	OB	600.000
2	Anggota	OB	500.000

8. HONORARIUM PEGAWAI HARIAN TIDAK TETAP

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2012 (Rp).
1	Strata 1 / Strata 2	OB	700.000
2	Diploma	OB	600.000
3	SLTA / Sederajat	OB	500.000

9. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2012 (Rp).
1	Penanggungjawab	OB	500.000
2	Redaktur	OB	450.000
3	Editor	OB	400.000
4	Web Athens	OB	350.000
5	Web Developer	OB	300.000
6	Pembuat Artikel	Halaman	100.000
7	Penerjemah	1500 karakter	90.000

10. HONORARIUM TIM OPERASIONAL LPSE KABUPATEN BOMBANA

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2013 (Rp)
1.	Pembina	OB	1.000.000
2.	Pengarah	OB	750.000
3.	Ketua	OB	700.000
4.	Wakil Ketua	OB	650.000

5.	Sekretaris	OB	625.000
6.	Wakil Sekretaris	OB	575.000
7.	Anggota	OB	575.000
8.	Tim Pelaksana Kegiatan		
	Ketua	OB	575.000
	Sekretaris	OB	450.000
	Admin PPE		
	a. Koordinator	OB	450.000
	b. Anggota	OB	375.000
	Trainer		
	a. Koordinator	OB	450.000
	b. Anggota	OB	375.000
	Verifikator		
	a. Koordinator	OB	450.000
	b. Anggota	OB	375.000
	Help Desk		
	a. Koordinator	OB	450.000
	b. Anggota	OB	375.000

11. HONORARIUM TIM AHLI BUPATI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2012 (Rp).
1	Tim Ahli Bupati	OB	7.500.000

12. HONORARIUM AJUDAN DAN PROTOKOLER BUPATI / WAKIL BUPATI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2012 (Rp).
1	Ajudan Bupati / Wakil Bupati	OB	2.000.000
2	Protokoler Bupati / Wakil Bupati	OB	2.000.000

13. HONORARIUM STAF RUMAH JABATAN BUPATI / WAKIL BUPATI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2012 (Rp).
1	Juru Masak	OB	500.000
2	Juru Cuci	OB	500.000
3	Pelayan / Staf Rumah Tangga	OB	500.000

14. HONORARIUM PETUGAS KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2012 (Rp).
1	Cleaning Service	OB	350.000
2	Penyapu Jalan	OB	650.000
3	Petugas Sampah	OB	750.000
4	Pemadam Kebakaran	OB	600.000

15. SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2012 (Rp)
1	Golongan I/PHTT	OH	25.000
2	Golongan II	OH	26.000
3	Golongan III	OH	27.000
4	Golongan IV	OH	29.000

16. SATUAN BIAYA MAKAN DAN MINUM SEMINAR / RAPAT / SOSIALISASI / PELATIHAN / WORKSHOP / SEJENISNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2012 (Rp)
1	Prasmanan	orang	40.000
2	Nasi Kotak	orang	25.000
3	Snack	orang	15.000

17. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR**17.1. Uang Lembur**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2012 (Rp)
1	Golongan I/PHTT	OJ	10.000
2	Golongan II	OJ	13.000
3	Golongan III	OJ	17.000
4	Golongan IV	OJ	20.000

17.2. Uang Makan Lembur

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2012 (Rp)
1	Golongan I/PHTT	orang	25.000
2	Golongan II	orang	26.000
3	Golongan III	orang	27.000
4	Golongan IV	orang	29.000

18. SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN / STRUKTURAL

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2012 (Rp)
1	Diklat PIM Tk. I	orang	40.000.000
2	Diklat PIM Tk. II	orang	30.261.000
3	Diklat PIM Tk. III	orang	22.125.000
4	Diklat PIM Tk. IV	orang	20.230.000

19. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

- 1) Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatan dan tugas - tugas fungsionalnya, dapat diberikan perjalanan dinas, yang diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- 2) Pelaksanaan perjalanan dinas dibatasi untuk hal - hal yang prioritas dan penting, serta sejauh mungkin dilakukan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan, dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Penanda tangan Surat Perintah Tugas (SPT);
 - Asisten, Kepala SKPD dan Staf Ahli yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah dengan terlebih dahulu memperoleh izin tertulis Bupati/Wakil Bupati Bombana;

- Pejabat Eselon III, IV dan staf lingkup SKPD yang melakukan perjalanan dalam daerah Provinsi ditanda tangani oleh masing - masing kepala SKPD yang bersangkutan;
 - Pejabat Eselon III, IV dan staf lingkup Pemerintah Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah Provinsi ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah.
- b. Penanda Tanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD):
- Asisten, Kepala SKPD dan Staf Ahli yang melakukan perjalanan dinas luar daerah ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah dengan terlebih dahulu memperoleh izin tertulis Bupati/Wakil Bupati Bombana.;
 - Pejabat Eselon III, IV dan staf lingkup SKPD yang melakukan perjalanan dalam daerah Provinsi ditanda tangani oleh masing - masing kepala SKPD yang bersangkutan;
 - Pejabat Eselon III, IV dan Staf yang melakukan perjalanan dinas luar daerah Provinsi ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah;
- 3) Dalam mengajukan SPT untuk ditanda tangani oleh Sekda harus disertakan surat/radiogram atau program kegiatan perjalanan dinas sebagai dasar untuk melakukan perjalanan dinas.
 - 4) Perjalanan Dinas dalam Daerah Kabupaten Maksimal 4 (empat) hari kecuali Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Inspektorat yang disesuaikan dengan urgensi dan maksud perjalanan dinas.
 - 5) Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan dinas, tidak diberikan uang transport.
 - 6) Perjalanan lokal dalam kota Bombana yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersifat rutin / terus yang karena tupoksinya, tidak menggunakan standar tersebut dalam ayat (6) huruf B dapat diberikan penggantian transportasi maksimal Rp. 200.000,- perbulan.
 - 7) Jika perjalanan dinas dilakukan oleh pejabat fungsional (PPL, Pengawas, Penyuluh Kesehatan, Penyuluh KB yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati) secara harian dan sifatnya insidental ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- perbulan.
 - 8) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Petugas Patroli dan Pengawalan (Patwal) serta staf yang melakukan dokumentasi dan pcliputan diberikan uang harian dalam bentuk Paket untuk perjalanan dinas lebih dari satu hari.
 - 9) Perjalanan dalam ibu kota (Rumbia & Rumbia Tengah) tidak diberikan lumpsum kecuali ke Desa Lampata Kecamatan Tengah.
 - 10) Setiap pejabat maupun staf yang melakukan perjalanan dinas wajib membuat laporan secara tertulis tentang hasil perjalanan dinas, serta wajib disertakan lampiran pertanggungjawaban seperti Tanda Bukti Kas, Tiket dan Boarding Pass.
 - 11) Khusus perjalanan dinas ke Luar Negeri biaya transportasi, visa airport tax, konsumsi dan akomodasi dibayarkan sesuai dengan harga kwitansi, sedangkan uang saku diberikan tambahan maksimal sebesar \$100/Orang/hari.
 - 12) Perjalanan dinas luar dalam rangka mengikuti bintek, seminar, workshop, diklat teknis dan lokakarya diupayakan pada kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan perguruan tinggi;
 - 13) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti bintek, seminar, workshop, diklat teknis dan lokakarya atas dasar undangan atau tawaran dari organisasi / lembaga tertentu diluar instansi pemerintah atau dinas terkait agar dilakukan secara selektif .

14) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud angka (12) dan (13) diatas yang menggunakan kontribusi, maka pemberian lumpsum hanya diberikan 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan dan dimungkinkan ditambah 1 (satu) hari Lumpsum dalam Provinsi yang disertai pembuktian SPPD.

15) Besar Biaya Transportdari Rumbia ke Daerah Tujuan dengan pengklasifikasian sebagai berikut:

a. Dalam Daerah Kabupaten

No	Tujuan	Transpor (Rp.)
1	Rumbia - Lampata	100.000,-
2	Rumbia - Mata oleo	200.000,-
3	Rumbia - Kep.Masaloka Raya	150.000,-
4	Rumbia - Rarowatu	100.000,-
5	Rumbia - Rarowatu Utara	100.000,-
6	Rumbia - Lantari Jaya	100.000,-
7	Rumbia - Mata Usu	450.000,-
8	Rumbia - Poleang Timur	175.000,-
9	Rumbia - Poleang Utara	150.000,-
10	Rumbia - Poleang Tengah	200.000,-
11	Rumbia - Poleang Selatan	200.000,-
12	Rumbia - Tontonunu	200.000,-
13	Rumbia - Poleang Tenggara	225.000,-
14	Rumbia - Poleang	250.000,-
15	Rumbia - Poleang Barat	300.000,-
16	Rumbia - Kabaena	350.000,-
17	Rumbia - Kabaena Barat	300.000,-
18	Rumbia - Kabaena Tengah	375.000,-
19	Rumbia - Kabaena Utara	375.000,-
21	Rumbia - Kabaena Selatan	375.000,-
21	Rumbia - Kabaena Timur	300.000,-

b. Dalam Daerah Provinsi

No	Tujuan	Transpor (Rp.)
1.	Rumbia - Kendari	400.000,-
2.	Rumbia - Unaaha/Konawe	600.000,-
3.	Rumbia - Kolaka	550.000,-
4.	Rumbia - Kolaka Utara	1.200.000,-
5.	Rumbia - Konawe Selatan	350.000,-
6.	Rumbia - Bau - Bau	1.200.000,-
7.	Rumbia - Pasar wajo	1.500.000,-
8.	Rumbia - Raha	750.000,-
9.	Rumbia - Wakatobi	2.000.000,-
10.	Rumbia - Buton Utara	1.500.000,-
11.	Rumbia - Konawe Utara	750.000,-

c. Luar Daerah Provinsi (at cost)

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI-PULANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	KOTA		(Dalam Rupiah) SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
I	II	III	IV	V
1	JAKARTA	AMBON	12,420,000	6,620,000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	6,930,000	3,550,000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7,030,000	4,200,000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2,250,000	1,480,000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	4,910,000	2,800,000
6	JAKARTA	BATA M	4,550,000	2,700,000
7	JAKARTA	BENGKULU	4,080,000	2,450,000
8	JAKARTA	BIAK	13,150,000	7,030,000
9	JAKARTA	DENPASAR	4,960,000	3,050,000
10	JAKARTA	GORONTALO	6,760,000	4,510,000
11	JAKARTA	JAMBI	3,800,000	2,300,000
12	JAKARTA	JAYAPURA	13,620,000	7,660,000
13	JAKARTA	JOGJAKARTA	3,840,000	2,120,000
14	JAKARTA	KENDARI	7,160,000	3,910,000
15	JAKARTA	KUPANG	8,800,000	4,750,000
16	JAKARTA	MAKASSAR	6,960,000	3,580,000
17	JAKARTA	MALANG	4,300,000	2,520,000
18	JAKARTA	MAMUJU	6,820,000	4,550,000
19	JAKARTA	MANADO	10,120,000	4,770,000
20	JAKARTA	MANOKWARI	15,170,000	10,120,000
21	JAKARTA	MATARAM	4,970,000	3,020,000
22	JAKARTA	MEDAN	6,780,000	3,560,000
23	JAKARTA	PADANG	5,170,000	2,760,000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4,660,000	2,790,000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3,610,000	2,120,000
26	JAKARTA	PALU	8,740,000	4,780,000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3,190,000	2,000,000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5,220,000	2,820,000

29	JAKARTA	PONTIANAK	4,070,000	2,600,000
30	JAKARTA	SEMARANG	3,610,000	2,040,000
31	JAKARTA	SOLO	3,610,000	2,190,000
32	JAKARTA	SURABAYA	5,110,000	2,500,000
33	JAKARTA	TERNATE	9,350,000	6,230,000
34	JAKARTA	TIMIKA	12,930,000	7,000,000
35	AMBON	DENPASAR	7,530,000	4,180,000
36	AMBON	JAYAPURA	6,950,000	3,890,000
37	AMBON	KENDARI	4,510,000	2,670,000
38	AMBON	MAKASSAR	5,630,000	3,230,000
39	AMBON	MANOKWARI	4,840,000	2,830,000
40	AMBON	PALU	5,740,000	3,280,000
41	AMBON	SORONG	3,400,000	2,110,000
42	AMBON	SURABAYA	8,230,000	4,530,000
43	AMBON	TERNATE	3,760,000	2,290,000
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	11,910,000	6,310,000
45	BALIKPAPAN	BATAM	9,680,000	4,960,000
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	10,040,000	5,280,000
47	BALIKPAPAN	JOGJAKARTA	9,040,000	4,440,000
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	17,830,000	9,430,000
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	11,840,000	5,750,000
50	BALIKPAPAN	MANADO	14,680,000	6,820,000
51	BALIKPAPAN	MEDAN	11,680,000	5,740,000
52	BALIKPAPAN	PADANG	10,230,000	5,020,000
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	8,830,000	4,440,000
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10,280,000	5,070,000
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	8,830,000	4,370,000
56	BALIKPAPAN	SOLO	8,830,000	5,060,000
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	10,180,000	4,780,000
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	17,210,000	8,830,000
59	BANDA ACEH	DENPASAR	10,130,000	5,870,000
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	17,920,000	1,020,000
61	BANDA ACEH	JOGJAKARTA	9,130,000	5,030,000
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	11,930,000	6,340,000

63	BANDA ACEH	MANADO	14,770,000	7.410,000
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	9,340,000	5,460,000
65	BANDA ACEH	SEMARANG	8,910,000	4,960,000
66	BANDA ACEH	SOLO	8,910,000	5.090,000
67	BANDA ACEH	SURABAYA	10.270,000	5.370,000
68	BANDA ACEH	TIMIKA	17,300,000	9.420,000
69	BANDARLAMPUNG	BALIKPAPAN	7,600,000	3.860,000
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	7,690,000	4,450,000
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	5,790,000	3.190,000
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.460,000	3.100,000
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	13.200,000	7.000,000
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	5.830.000	3.410,000
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	13,620.000	7.570.000
76	BANDAR LAMPUNG	JOGJAKARTA	4,820,000	2.580,000
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	7,810,000	4,190,000
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	7,630.000	3.890,000
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5,230.000	2.930,000
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	10,470.000	4.960,000
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	5,840,000	3.390,000
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7,460.000	3.880,000
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6,020,000	3.160,000
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5,560,000	3.180,000
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4,610,000	2.580,000
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.060,000	3,210,000
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.030,000	3.010,000
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4,610,000	2.510,000
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4,610,000	2.640,000
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	5,970.000	2.920,000
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13,000,000	6.970,000
92	BANDUNG	BATAM	5,880,000	3.350,000
93	BANDUNG	DENPASAR	5,260.000	3.040,000
94	BANDUNG	JAKARTA	1,930,000	1.380,000
95	BANDUNG	JAMBI	4,680,000	2,750,000
96	BANDUNG	JOGJAKARTA	3,150,000	1.990,000
97	BANDUNG	PADANG	5,730,000	3.280,000
98	BANDUNG	PALEMBANG	4,100,000	2.460,000
99	BANDUNG	PANGKALPINANG	4,300,000	2.560,000
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.100.000	3.460,000
101	BANDUNG	SEMARANG	2,830,000	1.830,000

102	BANDUNG	SOLO	3,410.000	2.120.000
103	BANDUNG	SURABAYA	4,510,000	2.0.000
104	BALIKPAPAN	TANJUNG PANDAN	4,150,000	4,430,000
105	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	10,090,000	5,730,000
106	BALIKPAPAN	BATAM	7.860,000	4,120,000
107	BALIKPAPAN	BIAK	15,600.000	3,920,000
	BALIKPAPAN			
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8,220,000	4,600,000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	16,020.000	8,75,000
110	BANJARMASIN	JOGJAKARTA	7,220,000	3,760,000
111	BANJARMASIN	MEDAN	9,860,000	5,060,000
112	BANJARMASIN	PADANG	8,420, 000	4,340,000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.010, 000	3,760,000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	8,460, 000	4,390,000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7,010,000	3,700,000
116	BANJARMASIN	SOLO	7,010.000	3,830,000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8,360.000	4,100,000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	15,400,000	8,150,000
119	BATAM	BANDA ACEH	9,760,000	5,550,000
120	BATAM	DENPASAR	7,900,000	4,510,000
121	BATAM	JAYAPURA	15.690,000	8,660,000
122	BATAM	JOGJAKARTA	6.890,000	3,680,000
123	BATAM	MA KASSAR	9,700,000	4,990,000
124	BATAM	MANADO	12, 540, 000	6,060,000
125	BATAM	MEDAN	9,530,000	4,970,000
126	BATAM	PADANG	8,090.000	4,250,000
127	BATAM	PALEMBANG	6,680.000	3,680,000
128	BATAM	PEKANBARU	8,140, 000	4,300,000
129	BATAM	PONTIANAK	7,100, 000	4,110,000
130	BATAM	SEMARANG	6,680, 000	3,610,00(1
131	BATAM	SOLO	&680,000	3,740,000

132	BATAM	SURABAYA	8,040,000	4,020,000
133	BATAM	TIMIKA	15.070,000	8,060,000
134	BENGKULU	PALEMBANG	2,710,000	1,770,000
135	BIAK	BALIKPAPAN	17,410,000	8,860,000
136	BIAK	BANDA ACEH	15,270,000	9,450,000
137	BIAK	BATAM	17,500,000	8,100,000
138	BIAK	DENPASAR	15,640,000	8,410,000
139	BIAK	JAYAPURA	3,380,000	2,170,000
140	BI AK	JOGJAKARTA	14.630,000	7,580,000
141	BIAK	MANADO	10,970,000	3,940,000
142	BIAK	MEDAN	17,270,000	8,880,000
143	BIAK	PADANG	15,830,000	8,160,000
144	BIAK	PALEMBANG	14,420,000	7,580,000
145	BIAK	PEKANBARU	15,880,000	8,210,000
146	B[AK	PONTIANAK	14,840,000	8,010,000
147	BIAK	SURABAYA	11,950,000	6,620,000
148	BIAK	TIMIKA	5.430,000	3,220,000
149	DENPASAR	JAYAPURA	10,920,000	6,400,000
150	DENPASAR	KUPANG	4,760,000	2,760,000
151	DENPASAR	MAKASSAR	3,910,000	2,460,000
152	DENPASAR	MANADO	7,340,000	4,000,000
153	DENPASAR	MATARAM	1,720,000	1,300,000
154	DENPASAR	MEDAN	9,900,000	5,290,000
155	DENPASAR	PADANC	8.460,000	4,570,000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8,000,000	4,590,000
157	DENPASAR	PALEMBANG	7,050.000	4,000,000
158	DENPASAR	PEKANBARU	8,500,000	4,620,000
159	DENPASAR	PONTIANAK	7,470,000	4,430,000
160	DENPASAR	TIMIKA	9,480,000	5,730,000

161	JAMBI	BALIKPAPAN	7,230,000	4,120,000
162	JAMBI	BANJARMASIN	7,190,000	3,920,000
163	JAMBI	DENPASAR	7,230,000	4,150,000
164	JAMBI	JOGJAKARTA	6,220,000	3,320,000
165	JAMBI	KUPANG	10,690,000	5,680,000
166	JAMBI	MAKASSAR	9,030,000	4,630,000
167	JAMBI	MALANG	6,630,000	3,670,000
168	JAMBI	MANADO	11,880,000	5,700,000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	6,960,000	3,920,000
170	JAMBI	PONTIANAK	6,430,000	3,750,000
171	JAMBI	SEMARANG	6,010,000	3,250,000
172	JAMBI	SOLO	6,010,000	3,380,000
173	JAMBI	SURABAYA	7,370,000	3,660,000
174	JAYAPURA	JOGJAKARTA	12,410,000	7,190,000
175	JAYAPURA	MANADO	20,670,000	10,530,000
176	JAYAPURA	MEDAN	17,700,000	9,440,000
177	JAYAPURA	PADANG	16,250,000	8,720,000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	14,840,000	8,150,000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	16,300,000	8,770,000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	15,260,000	8,580,000
181	JAYAPURA	TIMIKA	3,380,000	2,140,000
182	JOGJAKARTA	DENPASAR	3,610,000	2,320,000
183	JOGJAKARTA	MAKASSAR	6,100,000	3,640,000
184	JOGJAKARTA	MANADO	9,850,000	5,350,000
185	JOGJAKARTA	MEDAN	8,900,000	4,460,000
186	JOGJAKARTA	PADANG	7,450,000	3,740,000
187	JOGJAKARTA	PALEMBANG	6,040,000	3,160,000
188	JOGJAKARTA	PEKANBARU	7,500,000	3,790,000
189	JOGJAKARTA	PONTIANAK	6,460,000	3,590,000
190	JOGJAKARTA	TIMIKA	11,120,000	6,580,000
191	KENDARI	BANDA ACEH	12,110,000	6,640,000
192	KENDARI	BATAM	9,880,000	5,290,000
193	KENDARI	DENPASAR	5,100,000	3,060,000
194	KENDARI	JOGJAKARTA	7,600,000	4,400,000
195	KENDARI	PADANG	10,440,000	5,350,000
196	KENDARI	PALEMBANG	9,030,000	4,770,000
197	KENDARI	PEKANBARU	10,490,000	5,400,000
198	KENDARI	SEMARANG	9,030,000	4,700,000
199	KENDARI	SOLO	9,030,000	4,830,000

200	KENDARI	SURABAYA	10,380,000	5,110,000
201	KENDARI	TIMIKA	17,420,000	9,160,000
202	KUPANG	JAYAPURA	13,450,000	7,580,000
203	KUPANG	JOGJAKARTA	6,870,000	3,910,000
204	KUPANG	MAKASSAR	7,140,000	4,030,000
205	KUPANG	MANADO	10,890,000	5,740,000
206	KUPANG	SURABAYA	6,310,000	3,480,000
207	MAKASSAR	BIAK	7,940,000	4,610,000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	9,530,000	5,410,000
209	MAKASSAR	KENDARI	2,490,000	1,670,000
210	MAKASSAR	MANADO	4,980,000	2,720,000
211	MAKASSAR	TIMIKA	10,960,000	6,140,000
212	MALANG	BALIKPAPAN	9,450,000	4,800,000
213	MALANG	BANDA ACEH	9,540,000	5,390,000
214	MALANG	BANJARMASIN	7,630,000	4,120,000
215	MALANG	BATAM	7,310,000	4,030,000
216	MALANG	BIAK	15,040,000	7,930,000
217	MALANG	JAYAPURA	15,460,000	8,500,000
218	MALANG	KENDARI	9,650,000	5,130,000
219	MALANG	MAKASSAR	9,470,000	4,830,000
220	MALANG	MANADO	12,310,000	5,900,000
221	MALANG	MEDAN	9,310,000	4,810,000
222	MALANG	PADANG	7,870,000	4,100,000
223	MALANG	PALANGKARAYA	7,400,000	4,120,000
224	MALANG	PALEMBANG	6,450,000	3,520,000
225	MALANG	PEKANBARU	7,910,000	4,150,000
226	MALANG	TIMIKA	14,840,000	7,910,000
227	MANADO	MEDAN	14,540,000	6,840,000
228	MANADO	PADANG	13,100,000	6,120,000
229	MANADO	PALEMBANG	11,690,000	5,540,000
230	MANADO	PEKANBARU	13,140,000	6,170,000
231	MANADO	PONTIANAK	12,110,000	5,980,000
232	MANADO	SEMARANG	11,690,000	5,470,000
233	MANADO	SOLO	11,690,000	5,600,000
234	MANADO	SURABAYA	9,290,000	4,920,000
235	MANADO	TIMIKA	15,130,000	8,410,000
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10,050,000	5,250,000
237	MATARAM	BANDA ACEH	10,140,000	5,840,000

238	MATARAM	BANJARMASIN	8,230,000	4,570,000
239	MATARAM	BATAM	7,910,000	4,490,000
240	MATARAM	BIAK	10,800,000	6,120,000
241	MATARAM	JAYAPURA	12,240,000	6,850,000
242	MATARAM	JOGJAKARTA	4,130,000	2,600,000
243	MATARAM	MAKASSAR	4,410,000	2,720,000
244	MATARAM	MANADO	8,150,000	4,430,000
245	MATARAM	MEDAN	9,910,000	5,270,000
246	MATARAM	PADANG	8,470,000	4,550,000
247	MATARAM	PALEMBANG	7,060,000	3,970,000
248	MATARAM	PEKANBARU	8,510,000	4,590,000
249	MATARAM	PONTIANAK	7,480,000	4,400,000
250	MATARAM	SURABAYA	3,580,000	2,170,000
251	MEDAN	BANDA ACEH	3,240,000	2,050,000
252	MEDAN	MAKASSAR	11,700,000	5,770,000
253	MEDAN	PONTIANAK	9,100,000	4,890,000
254	MEDAN	SEMARANG	8,680,000	4,390,000
255	MEDAN	SOLO	8,680,000	4,520,000
256	MEDAN	SURABAYA	10,040,000	4,800,000
257	MEDAN	TIMIKA	17,070,000	8,840,000
258	PADANG	MAKASSAR	10,260,000	5,050,000
259	PADANG	PONTIANAK	7,660,000	4,170,000
260	PADANG	SEMARANG	7,240,000	3,670,000
261	PADANG	SOLO	7,240,000	3,800,000
262	PADANG	SURABAYA	8,600,000	4,080,000
263	PADANG	TIMIKA	15,630,000	8,120,000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	9,860,000	5,630,000
265	PALANGKARAYA	BATAM	7,630,000	4,280,000
266	PALANGKARAYA	JOGJAKARTA	6,990,000	3,760,000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8,000,000	4,570,000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	9,630,000	5,060,000
269	PALANGKARAYA	PADANG	8,190,000	4,340,000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	6,780,000	3,760,000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8,230,000	4,390,000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	6,780,000	3,690,000
273	PALANGKARAYA	SOLO	3,990,000	3,820,000

274	PALANGKARAYA	SURABAYA	14,220,000	4,100,000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	5,830,000	4,880,000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	7,190,000	4,470,000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	5,830,000	3,590,000
278	PALEMBANG	SEMARANG	6,250,000	3,090,000
279	PALEMBANG	SOLO	9,250,000	3,220,000
280	PALEMBANG	SURABAYA	8,850,000	3,500,000
281	PALEMBANG	TIMIKA	8,130,000	7,550,000
282	PALU	MAKASSAR	6,780,000	2,410,000
283	PALU	POSO	1,830,000	1,330,000
284	PALU	SORONG	6,430,000	3,630,000
285	PALU	SURABAYA	6,430,000	3,630,000
286	PALU	TOLI-TOLI	2,750,000	1,790,000
287	PANGKAL, PINANG	BALIKPAPAN	8,450,000	4,330,000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	6,630,000	3,660,000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6,300,000	3,570,000
290	PANGKAL PINANG	JOGJAKARTA	5,670,000	3,050,000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	8,470,000	4,360,000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	11,310,000	5,430,000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8,310,000	4,350,000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	6,860,000	3,630,000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5,450,000	3,050,000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	6,910,000	3,680,000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	5,870,000	3,490,000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5,450,000	2,980,000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5,450,000	3,110,000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	6,810,000	3,390,000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	7,710,000	4,220,000
302	PEKANBARU	SEMARANG	7,290,000	3,720,000

303	PEKANBARU	SOLO	7,290,000	3,850,000
304	PEKANBARU	SURABAYA	8,640,000	4,120,000
305	PEKANBARU	TIMIKA	15,680,000	8,170,000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9,270,000	4,900,000
307	PONTIANAK	SEMARANG	6,250,000	3,520,000
308	PONTIANAK	SOLO	6,250,000	3,650,000
309	PONTIANAK	SURABAYA	7,610,000	3,930,000
310	PONTIANAK	TIMIKA	14,640,000	7,980,000
311	SEMARANG	MAKASSAR	8,850,000	4,400,000
312	SOLO	MAKASSAR	8,850,000	4,530,000
313	SURABAYA	DENPASAR	2,990,000	1,850,000
314	SURABAYA	JAYAPURA	11,850,000	6,760,000
315	SURABAYA	MAKASSAR	5,550,000	3,210,000
316	SURABAYA	TIMIKA	10,560,000	6,160,000

- 16) Besar biaya harian dalam melaksanakan perjalanan dinas dibayar dalam bentuk Lumpsum (Penginapan, Uang Harian, Representasi dan Sewa Kendaraan) dengan pengklasifikasian sebagai berikut:

16.1. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

No	Uraian	Satuan	Biaya Tahun 2012
1.	Bupati	Hari	1.050.000
2.	Wakil Bupati	Hari	950.000
3.	Ketua DPRD	Hari	880.000
4.	Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD	Hari	843.000
5.	Eselon II.b dan Anggota DPRD	Hari	775.000
6.	Eselon III / Gol. IV	Hari	600.000
7.	Eselon IV / Gol. III	Hari	525.000
8.	Gol. II / Gol. I / Non PNS	Hari	400.000
9.	Dokumentasi / Peliputan	Paket	600.000
10.	Patwal	Paket	1.125.000

16.2. Perjalanan Dinas Dalam Provinsi

No	Uraian	Satuan	Biaya Tahun 2012
1.	Bupati	Hari	1.600.000
2.	Wakil Bupati	Hari	1.500.000
3.	Ketua DPRD	Hari	1.405.000
4.	Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD	Hari	1.343.000
5.	Eselon II.b dan Anggota DPRD	Hari	1.200.000
6.	Eselon III / Gol. IV	Hari	1.000.000
7.	Eselon IV / Gol. III	Hari	800.000
8.	Gol. II / Gol. I / Non PNS	Hari	650.000
9.	Dokumentasi / Peliputan	Paket	1.000.000
10.	Patwal	Paket	1.500.000

16.3. Perjalanan Dinas Luar Provinsi

No	Uraian	Satuan	Biaya Tahun 2012				Kelas
			Lumpsum	Airport Tax	Taksi Bandara		
					Rumbia - Bandara Haluoleo PP	Bandara - Penginapan Daerah Tujuan PP	
1.	Bupati	Hari	2.775.000	80.000	400.000	380.000	Bisnis
2.	Wakil Bupati	Hari	2.668.000	80.000	400.000	380.000	
3.	Ketua DPRD	Hari	2.561.000	80.000	400.000	380.000	
4.	Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD	Hari	2.104.000	80.000	400.000	380.000	ekonomi
5.	Eselon II.b dan Anggota DPRD	Hari	2.000.000	80.000	400.000	380.000	
6.	Eselon III /	Hari	1.710.000	80.000	400.000	380.000	

	Gol. IV					
7.	Eselon IV / Gol. III	Hari	1.150.000	80.000	400.000	380.000
8.	Gol. II / Gol. I / Non PNS	Hari	900.000	80.000	400.000	380.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2012.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 15 Juni 2012


BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
Pada tanggal, 16 Juni 2012


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA,

H. RUSTAM SUPENDY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2012 NOMOR 17.